

## **Implementasi Distribusi Bantuan Sosial (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar**

*Implementation of the Distribution of Social Assistance (Raskin) for the Poor in Bontoala Parang Village, Bontoala District, Makassar City*

**Sarmila<sup>\*</sup>, Udin B. Sore, Natsir Tompo**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa  
email: milas7793@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2022 / Disetujui : 30 Januari 2022

### **Abstrak**

Proses analisis data menggunakan teknik analisis dan deskriptif dengan melalui tiga alur penerapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Program Bantuan Sosial Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentang). Pada umumnya bantuan sosial memiliki masalah terkadang tidak tepat sasaran. Maka sangat penting kemudian untuk mengetahui bagaimana kondisi implementasi pendistribusian dalam menjalankan program raskin selama ini. Melalui hasil penelitian yang dilakukan, bahwa terdapat masalah dalam waktu pelaksana dan bagaimana efektivitas penyaluran program raskin. Waktu pelaksanaan yang tidak teratur yang menyebabkan keterlambatan penyaluran beras miskin, Ketidakefektifan manfaat yang diharapkan dari keberadaan program raskin tidak tercapai. Tanggung jawab yang dilakukan oleh kelurahan mengakibatkan kurangnya transparansi harga dan target yang belum maksimal.

**Kata Kunci:** Implementasi, Distribusi, Program Raskin, Efektivitas

### **Abstract**

*The data analysis process uses analytical and descriptive techniques through three application paths, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing/data verification. The Raskin Social Assistance Program is one of the poverty reduction and social protection programs in the food sector organized by the Central Government in the form of subsidized rice assistance to low-income households (poor and low-income households). In general, social assistance has the problem of sometimes not being well targeted. So it is very important then to know how the conditions of distribution implementation in carrying out the Raskin program so far are. Through the results of research conducted, that there are problems in the implementation time and how the effectiveness of the distribution of the Raskin program. Irregular implementation time which causes delays in distributing rice to the poor, the ineffectiveness of the expected benefits of the existence of the Raskin program is not achieved. The responsibility carried out by the kelurahan results in a lack of price transparency and targets that have not been maximized.*

**Keywords:** Implementation, Distribution, Raskin Program, Effectiveness



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## **A. PENDAHULUAN**

Kesulitan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan dasar warga negara tertentu tidak terpenuhi karena tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Akibatnya, sebagian warga masih mengalami tantangan dalam menjalankan fungsi sosial, sehingga menghalangi mereka untuk menjalani kehidupan yang

layak dan bermakna. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan Indonesia telah menurun. Namun, hal ini tidak meniadakan fakta bahwa Indonesia memiliki masalah kemiskinan. Masih banyak orang yang hidup di ambang kelaparan.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), jumlah penduduk miskin di Indonesia 26,42 juta orang (9,78 persen) pada Maret 2020, naik 1,63 juta orang dari September 2019 yang sebesar 24,79 juta orang (9,22 persen). Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan Indonesia tidak akan berkurang, dan penduduk miskin negara itu akan bertambah tahun ini (Badan Pusat Statistik, 2020). Di Indonesia, beras merupakan makanan utama bagi 95% penduduk, dengan rata-rata konsumsi beras 113,7 kilogram per orang per tahun. Jumlah konsumsi ini secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata global 60 kg/kapital/tahun. (Pedoman Umum Raskin, 2014). Alhasil, Indonesia menjadi konsumen beras paling besar di dunia. Beras menyumbang sekitar 45 persen dari keseluruhan asupan makanan di Indonesia, atau sekitar 80 persen dari sumber karbohidrat utama dalam kebiasaan makan masyarakat Indonesia. Beras tetap menjadi bahan pangan yang paling esensial bagi penduduk secara gizi, ekonomi, sosial, dan budaya karena penyebarannya sangat merata di seluruh Indonesia.

Program Beras Bersubsidi yang biasa juga disebut Beras Miskin (RASKIN) dan Beras Sejahtera (RASTRA), merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan rumah tangga miskin dengan mengupayakan perlindungan sosial berupa beras murah senilai hingga 15 kg per rumah tangga miskin per bulan dengan harga Rp 1600 per kg (netto) masing-masing di titik distribusi (Ruru, 2015). Perum Bulog bertugas mengantarkan beras dari gudang ke lokasi distribusi di kelurahan dengan skema ini, yang mencakup seluruh provinsi. Program Raskin ialah subsidi pangan yang dirancang oleh pemerintah untuk membangun ketahanan pangan dan memberi perlindungan kepada keluarga kurang mampu dengan membagikan beras kepada mereka.

Instrumen kebijakan program Raskin yakni Peraturan Pemerintah No. 68 (2002) tentang Ketahanan Pangan. Menurut PP tersebut, merencanakan program dan menganalisis serta mengevaluasi unsur-unsur yang mempengaruhi ketersediaan pangan sangat penting dalam kegiatan pencegahan dan penyelesaian masalah pangan. Pembagian Raskin itu seharusnya dilakukan dengan prosedur yang baik. Prosedur didefinisikan dengan adanya program raskin yang dapat diwujudkan dengan mengkoordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kementerian/lembaga terkait baik di Pusat maupun di Daerah. Prosedur adalah serangkaian langkah (atau pelaksanaan pekerjaan) yang menggambarkan apa yang harus dilakukan, bagaimana harus dilaksanakan, kapan harus dilaksanakan, di mana harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melakukannya.

Raskin tidak tersedia untuk masyarakat Indonesia secara menyeluruh, tetapi hanya tersedia untuk individu yang sangat miskin dan rawan pangan di tempat-tempat tertentu. Data keluarga miskin dan rawan pangan diperoleh dari beberapa sumber seperti kelurahan dan sebagainya untuk memilih kelompok, terutama sesuai dengan kriteria yang diberikan. Koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi Kementerian/Lembaga terkait di tingkat Pusat dan Daerah diperlukan agar program Raskin dapat berjalan efektif. Dimulai dengan merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasi dilakukan dengan premis bahwa Raskin merupakan hak dari orang kurang mampu. Seluruh pihak yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan program Raskin berkewajiban untuk mendistribusikan Raskin kepada Rumah Tangga Penerima Manfaat (RTS-PM) yang ditetapkan oleh BPS, berdasarkan peran dan fungsi utama masing-masing. Pemerintah pusat memiliki andil dalam mengembangkan kebijakan program, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berperan dalam mendongkrak keberhasilan program Raskin sangat penting.

Program Raskin dimaksudkan untuk meringankan beban keuangan rumah tangga miskin dalam upaya membantu peningkatan ketahanan pangan dengan melindungi akses masyarakat terhadap beras murah. Program Raskin dimaksudkan untuk memberi peningkatan pada akses keluarga miskin terhadap pangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga memperkuat ketahanan pangan keluarga dan menahan pemerosotan konsumsi energi dan protein.

Para pelaksana program, maupun masyarakat miskin yang mendapatkan beras miskin seringkali menghadapi penyimpangan atau masalah. Salah satunya adalah banyak orang ekonomi tinggi yang masuk kategori mendapatkan beras miskin, sementara mereka yang benar-benar miskin tidak menerima program ini. Hal tersebut karena data yang diberikan oleh kelurahan atau desa dari kantor statistik sudah lama (tidak diperbarui), dan karenanya tidak akurat untuk situasi saat ini. Dimana ada orang sejahtera yang mendapatkan beras miskin karena data yang tersedia menunjukkan bahwa masyarakat tetap miskin. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa program beras miskin merupakan program kelurahan daripada program pemerintah pusat, sehingga mereka mendatangi kantor kelurahan untuk meminta jatah bantuan pangan bagi masyarakat miskin. Hal ini membuktikan jika masih adanya masyarakat yang belum mengerti tentang beras miskin tersebut.

Permasalahan lain terkait pendistribusian beras miskin kepada masyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan aturannya kadang jika ada sisa beras Raskin tersebut maka pihak kelurahan sendiri biasa menjual kembali beras Raskin tersebut ke pedagang-pedangan di sekitar kelurahan itu sendiri. Program Raskin merupakan tindak lanjut dari arahan kebijakan pemekaran nasional Presiden. Presiden mengarahkan seluruh Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia, untuk bekerja meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi pedesaan, dan stabilitas ekonomi nasional.

Penyaluran Raskin dimulai dengan permintaan alokasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat melalui Surat Pemerintah Alokasi (SPA). Kadivre/Kasubdivre yang bertanggung jawab atas area tersebut ditunjukkan SPA. Tim koordinasi Raskin setempat membahas jadwal pendistribusian SPA agar masyarakat memiliki waktu, tenaga, dan uang tunai untuk mempersiapkan pendistribusian. Tim Koordinasi Raskin memeriksa kondisi beras Raskin yang akan didistribusikan sebelum dijadwalkan pengirimannya ke Titik Distribusi. Beras raskin kemudian dikirim ke titik distribusi asal berdasarkan data RTS yang terkumpul di daerah tersebut. BULOG tidak menambah atau mengurangi apapun. Musyawarah Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan memiliki kewenangan atas setiap perubahan data RTS (Rumah Tangga Sasaran).

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menjelaskan atau meringkas suatu masalah, penelitian kualitatif seharusnya dapat memberikan informasi kualitatif maka nantinya dapat lebih fokus pada permasalahan proses dan makna. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menemukan atau menggambarkan realitas peristiwa yang diteliti, atau bersifat komparatif, yaitu berusaha menghubungkan dengan faktor-faktor lain (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini peneliti difokuskan pada Distribusi Bantuan Sosial Raskin Di Kelurahan Bontoala Parang Kota Makassar dengan mengambil lokasi disekitaran Kelurahan.

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi, yaitu penggabungan tiga teknik pengumpulan data yang berbeda observasi, wawancara, dan dokumentasi yang

kemudian dapat digunakan untuk membahas hasil penelitian berdasarkan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Dalam penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap memiliki data serta informasi yang lebih akurat mengenai penelitian yang akan dilakukan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 orang yang berasal dari Kantor Lurah Bontoala Parang dan Masyarakat Penerima Bantuan Program Raskin (1) Bapak Lurah Bontoala Parang, (2) Staff Kesejahteraan Sosial Kelurahan, (3) Staff Tksk kelurahan, (4) Staff Pemberdayaan Rt/Rw, (5) Masyarakat 5 Orang.

Dalam penelitian kualitatif Pengujian keabsahan data pada umumnya, selain dimanfaatkan untuk menyangkal klaim bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah merupakan komponen integral dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2006). Validitas data diperiksa untuk melihat apakah penelitian dilaksanakan secara ilmiah dan untuk melihat apakah data yang didapatkan akurat. Dalam penelitian kualitatif, penilaian kredibilitas (kepercayaan), transferabilitas (keteralihan), Dependability (kebergantungan), dan Confirmability (kepastian) digunakan untuk menentukan validitas data (Sugiyono, 2007) Sangat penting untuk menilai keabsahan data dalam penelitian kualitatif untuk mempertanggungjawabkannya sebagai penelitian ilmiah. Dimungkinkan untuk melakukan uji validitas data. Selanjutnya ada teknik keabsahan data menurut Milen dan Hubberman (Sugiyono, 2007) berpendapat, teknik analisis data peneliti mencakup (pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan atau verifikasi).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerima Manfaat program Sembako yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah di daerah pelaksanaan, kemudian disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya tercatat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan penetapannya ditentukan oleh KPA di Kementerian Sosial. DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM program Sembako yang telah diverifikasi dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

#### **1. Proses Distribusi Bantuan Sosial (RASKIN) Bagi Masyarakat Miskin di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar**

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (RASKIN) merupakan program nasional lintas sektoral yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan pangan beras dalam skala horizontal dan vertikal. Kontribusi dilakukan secara horizontal oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait [K-L] berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Kebijakan program dibuat oleh Pemerintah Pusat, namun pelaksanaannya sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Raskin, peran pemerintah daerah sangat penting.

Tabel 1. Tahap Proses Penyaluran Raskin

<b>No</b>	<b>Tahap</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Penanggungjawab</b>
1	Tahap I	Pusat	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Menteri (TNP2K) Koordinator
2	Tahap II	Provinsi	Tim Koordinasi Raskin Provinsi, Gubernur
3	Tahap III	Kabupaten	Tim Koordinasi Raskin kabupaten, Bupati
4	Tahap IV	Kecamatan	Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Bupati/Walikota
5	Tahap V	Kelurahan	Tim Koordinasi Raskin Kelurahan, kepala desa atau Lurah atau Kepala Desa Pemerintah Setingkat

---

Masyarakat Penerima Raskin

---

## a) Sistem Transportasi

Sistem transportasi adalah alat utama dalam hal distribusi dan pemasaran produk. Pengiriman barang melalui darat dan laut tidak mungkin dilakukan tanpa alat transportasi. Untuk pendistribusian barang, sarana transportasi memegang peranan penting dan sangat diperlukan. Begitupun dalam sistem distribusi Program Raskin, sistem transportasi yang tepat akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, salah satunya bersama Kamaria S.E yang merupakan staff Staf Kantor Kelurahan Bontoala Parang yang berusia 42 tahun. Beliau berprofesi sebagai tenaga kesejahteraan sosial kelurahan yang membantu ibu Harmawati dalam tugas sosial terhadap masyarakat sekitar, dimana beliau mengatakan: pegawai kelurahan akan menghubungi pihak-pihak penerima raskin dan wajib membawa kupon, alurnya Bupati/walikota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada kadivreg/kasubdivreg/kakansilog berdasarkan alokasi pagu raskin dan rumah tangga miskin penerima manfaat raskin disetiap kecamatan atau kelurahan, beras di gudang penyimpanan perum bulog diambil oleh satuan kelompok raskin lalu diangkut dan beras raskin diserahkan kepada pelaksana distribusi (satuan kerja di titik pendistribusian yaitu aparat kecamatan atau kelurahan), Pelaksana distribusi menyalurkan beras kepada rumah tangga miskin secara per orang (Kamaria S.E (2/6/2021))

Pernyataan informan tersebut mrngatakan bahwa pengiriman raskin yang dilakukan bupati/walikota sudah terstruktur dengan baik ke masing-masing kecamatan atau kelurahan. Staff bagian kelurahan akan mengambil beras raskin digudang bulog dan akan menginformasikan kepada pihak penerima untuk mengambil beras raskin yang sudah tersedia di kelurahan maupun di toko terdekat.

## b) Ketersediaan Produk

Ketersediaan produk dan harga merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan konsumen dalam pembelian termasuk dalam sistem penyaluran bantuan. Terkait ketersediaan produk yang dimaksud, maka peneliti merangkum pernyataan beberapa informan yang dapat menjawab indikator pada penelitian ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing informan khususnya dalam penyaluran bantuan ini.

Raskin yang diterima secara teratur dapat menjamin ketersediaan pangan pokok, berupa beras, di rumah tangga tersebut tercukupi secara stabil, sehingga apabila ketersediaan pangan rumah tangga tercukupi diharapkan dapat memperbaiki kondisi rawan pangan rumah tangga berada dalam kondisi tahan pangan (Pedoman Umum Raskin, 2015)

Lebih lengkap bahwa Harmawati Rsusly menjelaskan jumlah beras raskin yang diterima per kepala keluarga adalah 1 karung dengan harga yang dipatok Rp. 30.000/karung beras, sedangkan biaya distribusi yang dipatok pemerintah senilai Rp. 24.000.

Ibu Kameria membernarkan apa kata ibu Harmawati bahwa “penerima beras raskin berjumlah 93 orang dan untuk tahun ini kami dari kelurahan belum penambah jumlah masyarakat yang akan menderima dikarenakan adanya bebrapa faktor yang membuat dinas sosial belum menambah data penerima” Kameria S.E (2/6/2021).

## c) Waktu Penantian

Waktu Penantian dalam proses distribusi bantuan ini dinyatakan dalam penggambaran rentan waktu bantuan di salurkan dan selanjutnya di salurkan Kembali. Dalam wawancara yang dilakukan di kantor Lurang Bontoala Parang, peneliti menghimpun pernyataan informan yang dapat menggambarkan rentan waktu bantuan di salurkan berdasarkan pada pengalaman yang mereka jalankan selama ini.

Kembali, Harmawati Rsusly menyatakan bahwa:

“Waktu pendistribusian raskin di kelurahan bontoala parang tidak menentu dikarenakan jadwal dari pusat bisa berubah-ubah kadang tanggal muda 5 atau tanggal tua 20, ini yang biasa masyarakat keluhkan. Biasanya yang sebabkan waktu pendistribusian tidak menentu karena masih ada berkas-berkas yang belum dilengkapi, terus dari atas juga lama merespon. Jadi kami di kelurahan tidak bisa apa apa” Harmawati Rusly (29/5/2021)

Dan saat itu, beliau akui bahwa penyaluran bantuan ini kadang masih tidak tepat waktu dikarenakan kondisi dan keadaan yang berubah-ubah. Pemerintah kelurahan tidak dapat langsung memberikan instruksi kepada masyarakat karena seala ketentuan distribusi ditentukan oleh kebijakan pusat. Pihak kelurahan hanya bertugas sebagai perantara untuk menyalurkan raskin kepada penerima di kelurahan itu sendiri. Pemerintah pusat yang menangani raskin dinilai kurang tanggap dalam memberikan respon oleh pemerintah kelurahan sehingga kelurahan hanya bisa menunggu waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

## **2. Efektifitas Pelaksanaan Distribusi Bantuan Sosial (RASKIN) Bagi Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bontoala Parang Kecamatan Bontoala Kota Makassar**

### **a) Kemampuan Adaptasi**

Adaptasi diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan baik waktu maupun kondisi lingkungan terhadap program yang sedang dijalankan. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan agar tidak lagi terdapat komunikasi yang *miss* antara pemberi program, pendistribusi dan penerima program. Yandi Idris, masyarakat Bontoala Parang penerima bantuan beras raskin Ketika ditanyakan oleh peneliti terkait pencapaian tujuan dari penyaluran bantuan ini dengan yakin ia menjawab bahwa belum. Banyak hal yang ia akui dalam penyaluran bantuan ini belum maksimal. (27/6/2021).

Dalam penuturannya, Yandi Idris menjawab peneliti bahwa Belum tersampaikan dengan baik, masih banyak menurut saya perlu diperbaiki. Seperti waktu yang tidak menentu, kualitas beras yang juga tidak menentu, kadang baik kadang bau dan lain-lain. Tapi, terlepas dari itu, sangat berpengaruh dalam kehidupan kami karena saya kesian tidak mampu. (Bapak Yandi Idris (27/06/2021)

Pernyataan diatas memberi pemahaman bahwa pemerintah kurang memperhatikan bantuan raskin yang diberikan. Meskipun beras yang disalurkan adalah bentuk bantuan sebaiknya pemerintah juga memperhatikan kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, lagi-lagi masyarakat mengeluhkan waktu yang tidak tersistematis yang kemudian berdampak pada ekonomi masyarakat.

### **b) Kepuasan Kerja**

Dalam wawancara mengenai kepuasan kerja, Maryani, Lela dan Salwiah dalam kapasitasnya sebagai masyarakat yang menerima dampak penyaluran bantuan beras raskin ini sepakat bahwa sangat berdampak dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari keluarga mereka. Selain itu, Salwiah menambahkan 80% bagus dan bersih tetapi tidak terlalu putih. Tapi begitumi kadang juga ada yang mengeluh tetangga tetangga yang dapat ada yang bau. Tidak bagus dimasak. Jadi tolong kesian biar ini kita orang tidak mampu setidaknya bisa dipikirkan juga mana yang layak dimasak. (Ibu Salwiah(10/6/2021)

Kemudian diikuti oleh Maryani yang mengatakan tidak terlalu bagus, kadang bau, banyak tetangga ku mengeluh kesian. Bisa mungkin pemerintah pilih pilih sedikit yang bisa dimasak. (Ibu Maryani(11/6/2021). Sedangkan Lela yang berpendapat bahwa beras yang diterima cukup bagus.

### **c) Tanggung Jawab**

Dalam hal ini, pemenuhan indikator Tanggung jawab digambarkan Kembali dengan pendapat informan yang kedudukannya sebagai masyarakat karena bagaimanapun

masyarakat yang menerima dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan, termasuk penyaluran raskin ini.

Lela mengatakan tidak, karena raskin yang ditentukan pemerintah 24.000 sementara harga yang diberikan kepada kami 30.000, ini sebenarnya yang paling dibicarakan sama tetangga, kenapa itu katanya ada dikasiki harga murah na pas adami dibayar bukan harga segitu. Kadangki bingung yang mana mau dipercayai sebenarnya ini. Kalau memang kasian seharga Rp. 24.000, kenapa diminta Rp. 30.000 (Ibu Lela 10/6/2021)

Penjelasan lebih lanjut sejalan dengan hal ini dikatakan bahwa Sumber daya mempunyai peranan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika pelaksana kebijakan sebagai penanggung jawab kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, terlepas dari seberapa jelas dan konsistennya ketentuan dan aturan, atau seberapa akurat penyampaiannya. Hal ini tergambar dari beberapa pernyataan masyarakat yang di wawancara mengeluhkan adanya ketidaksesuaian antara harga yang dipatok pemerintah dengan Rp. 24.000/karung beras namun yang diberikan kepada masyarakat senilai Rp. 30.000.

Hal tersebut memicu ketidakpercayaan masyarakat dan menduga adanya keuntungan dibalik penyaluran bantuan ini. Oleh karena itu, pemenuhan indikator tanggung jawab ini secara spesifik membutuhkan komunikasi yang terbuka kepada masyarakat, lebih transparan dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi aparat dalam proses pendistribusian bantuan.

#### d) Pencapaian Target

Dalam indikator ini, peneliti mencoba membandingkan informan pihak pemerintah kelurahan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat dari bantuan raskin ini.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk diterapkan mempunyai sasaran atau target yaitu memberi kesejahteraan. Jika kondisi target terpenuhi dalam implementasi kebijakan, maka akan sama efektifnya dengan kebijakan lainnya. Sebagai bagian dari evaluasi efektivitas implementasi kebijakan, sasaran kebijakan menjadi tolak ukur yang penting. Kita lihat siapa yang ditargetkan untuk menerima kebijakan dalam kasus ini, serta kondisi kesiapan intervensi yang ditargetkan untuk menerimanya..

Dalam wawancara dengan Harmawati Rsusly selaku tenaga kesejahteraan sosial kelurahan/ bagian pendistribusian raskin Ketika ditanyai tentang apakah penerima RASKIN/BPNT di Kelurahan Bontoala Parang sudah tepat sasaran, beliau secara terantangan menjawab bahwa:

tidak tepat sasaran dikarenakan ada beberapa masyarakat yang tergolong mampu tetapi masih mendapatkan beras raskin, tapi maaf ini diluar kemampuan kami, karena kami hanya diberi data sekian ya berarti sekian. (Ibu Harmawati Rsusly (29/5/2021)

Kemudian ia menjelaskan juga bahwa kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan raskin yaitu adanya beberapa masyarakat yang tidak terima jika mereka tidak mendapatkan program raskin ini. Serta diakui pula bahwa:

pernah ada yang complain/mengeluh, dikarenakan adanya ketidakadilan dalam penyaluran raskin, tapi ya itulah tantangan yang harus dihadapi. Karenakan untuk capai pemerataan pasti tidak mudah. (Ibu Harmawati Rsusly (29/5/2021)

Sementara itu, pertanyaan serupa juga ditujukan kepada Octapiana L. Sembe S.Sos selaku kepala seksi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat menyatakan:

belum tepat sasaran dikarenakan masih banyak yang belum mendapatkan program raskin. (Ibu Maryani seorang janda (10/6/2021)

Kemudian beliau menjelaskan juga bahwa:

Ibu Maryani mengatakan bahwa jumlah bantuan raskin yang di berikan untuk masyarakat sudah tepat dengan menerapkan 1 karung beras per kepala keluarga. (Ibu Maryani (10/6/2021)

Respon dan kesiapan masyarakat untuk melaksanakan program Raskin. Wawancara ini mengungkapkan bahwa masyarakat senang dengan kebijakan beras miskin pemerintah karena mereka tidak terbebani dengan harga beras di pasar mahal yang jarang dikunjungi atau dibeli. Namun, masih ada orang yang cukup kaya untuk meminta bagian dari beras miskin pemerintah, yang juga dianggap sebagai tindakan menyimpang.

#### **D. KESIMPULAN**

Proses Pendistribusi Bantuan Sosial (RASKIN) Bagi Masyarakat Miskin sudah berjalan sesuai aturannya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa indikator yang sudah berjalan dengan semestinya misalnya indikator sistem transportasi ditribusi yang berjalan dengan aturan yang pemerintah buat dan indikator ketersediaan produk tetapi untuk indikator waktu penantian belum berjalan dengan baik dikarenakan waktu pelaksanaan program raskin masih terjadi keterlambatan juga menjadi masalah bahwa waktu penantian belum tepat waktu.

Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Bontoala Parang tidak berjalan dengan efektif. Ketidakefektifan diakibatkan manfaat yang diharapkan dari keberadaan program raskin tersebut tidak tercapai. Tanggung jawab yang dilakukan oleh kelurahan mengakibatkan kurangnya transparansi harga antara kelurahan dan masyarakat setempat dan Target yang belum maksimal dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang persoalan bantuan yang tidak merata kepada seluruh masyarakat miskin yang berada di Kelurahan Botoala.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistika. (2020). Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 Naik Menjadi 9,78 Persen. Diakses 3 Desember 2020.
- Kotler, P., & Keller, L. (2007). Prinsip-Prinsip Manajemen Pemasaran. Salemba Empat.
- Moleong. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja.
- Pedoman Umum Raskin. (2014). Pedoman Umum Raskin 2014. Diakses 2 Desember 2020.
- Pedoman Umum Raskin. (2015). Pedoman Umum Raskin 2015. Diakses 2 Desember 2020.
- Ruru, G. K. B. K. J. M. (2015). Program Beras Miskin (raskin) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Diakses Dari Ejournal.Unsrat.Ac.Id Pada Tanggal 13 Desember 2020.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.